

Otonomi Guru pada Era Kurikulum Berbasis Kompetensi

Edy Herianto

Abstract: Teachers' autonomy is the important part the teacher should own, especially on the format of Competence-Based Curriculum (KBK). It will be clear on the autonomy in planning, implementing and evaluating the learning process. To gain this autonomy, the roles expected from the teachers are the implementation of professional action related to the teacher's internal and external responsibility. In the stage of the implementation, the teacher's autonomy can be viewed when the learning process is in action by noting the Activeness, Creativity, Efficiency, and Excitement (PAKEM). The PAKEM pattern on the teaching-learning process is principally an effort to comprehensively and optimally manage the better potential of the students in class. All physical and mental potential of the students need to be cared and included in the teacher's plan, action and evaluation of the learning process.

Kata kunci: otonomi guru, pembelajaran, kurikulum berbasis kompetensi

Pada akhir-akhir ini, peran guru sedang dipertanyakan kembali. Serangkaian kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok siswa di Jakarta menjadi tanggungjawab guru. Guru di sekolah kurang memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kejiwaan siswa, sehingga mereka melakukan suatu kejahatan. Beberapa siswa di sekolah tertentu telah kejangkitan narkoba. Ada guru di sekolah tertentu menggauli siswa di bawah umur (Asmuni, 2003). Masih banyak lagi serentetan kejadian kurang terpuji yang dialamatkan pada guru. Sudah sedemikiankah mutu guru? Kenapa berita di mass media (cetak

Edy Harianto adalah dosen FKIP Universitas Mataram.

maupun elektronik) lebih sering mengemukakan keburukan guru daripada kebaikannya?

Rasanya, masyarakat mendambakan sosok guru yang benar-benar mampu *digugu* dan *ditiru*. *Digugu*, dalam arti masyarakat perlu memberikan penghargaan dan penghormatan yang layak dan wajar. Guru memang memiliki sosok yang patut untuk menerima hal itu. *Ditiru*, dalam arti setiap percakapan dan tindakannya patut untuk ditiru oleh masyarakat (siswa). Guru memang bukanlah sosok manusia yang tidak pernah membuat kesalahan, akan tetapi lebih mengedepankan sosok yang patut diteladani dan diikuti dengan taraf kesalahan yang relatif wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sekelumit harapan dan kenyataan itu patut direnungkan oleh semua lapisan masyarakat. Apa yang salah dengan sosok guru dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Dari perenungan itu, setidaknya-tidaknya terdapat dua sinyalemen.

Pertama, keruwetan dunia pendidikan sesungguhnya berasal dari dalam institusi pendidikan. Sebagai contoh, calon guru yang mendaftar sebagai mahasiswa di FKIP/STKIP/IKIP pada umumnya bukanlah calon yang benar-benar memilih guru sebagai profesi utama yang didambakannya. Akibatnya, mahasiswa kuliah seadanya dan asal lulus (patut dibuktikan dengan penelitian!). Terlebih lagi, fenomena dibukanya program Akta IV yang memungkinkan sarjana nonkependidikan dapat menjalankan profesinya di bidang kependidikan, kurang diikuti oleh keinginan yang kuat untuk benar-benar mengabdikan diri sebagai guru yang sejati. Sebagian diantara mereka lebih didorong oleh suatu kenyataan bahwa betapa sulitnya mencari kerja di republik ini, sehingga mahasiswa yang semula memilih profesi nonkependidikan dan setelah lulus (sarjana) ternyata tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan impiannya, akhirnya berubah pikiran untuk menjadi guru.

Kedua, ketidakberesan penyelenggaraan pendidikan secara umum lebih dipengaruhi oleh kurang profesionalnya penentu kebijakan di bidang pendidikan. Sistem penyelenggaraan pendidikan belum didasarkan pada aturan yang baku dan menjadi panutan bersama seluruh lapisan masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. Ketidak-konsistenan pemerintah dalam memperhatikan persoalan kesejahteraan guru menjadi alasan bagi guru untuk kurang optimal dalam menjalankan profesinya. Sebagai contoh, pemerintah sudah beberapa kali mengumumkan akan menaikkan gaji/tunjangan guru, akan tetapi kenaikan itu tidak sebanding dengan kenaikan kebutuhan pokok sehari-hari. Guru masih dibelenggu dengan peraturan-peraturan yang kurang me-

mungkinkan untuk berkreasi, berinovasi dan mandiri dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hasil penelitian Herianto (1997) menunjukkan bahwa guru dibebani tugas administratif yang padat, sehingga kurang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas utama di bidang akademik (pengajaran).

Tanpa bermaksud mengurangi arti penting sinyalemen pertama, pada sinyalemen kedua seringkali dirasakan sebagai pangkal utama mengapa guru kurang memiliki otonomi dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Hasil survai terbatas (nonpublikasi) dengan para guru di Mataram menunjukkan bahwa para guru ingin berbuat lebih banyak untuk keberhasilan siswa di sekolah, akan tetapi guru kurang diberikan otonomi secara bertanggungjawab. Pentingnya otonomi guru menjadi keharusan, terlebih lagi adanya keinginan Depdiknas untuk menerapkan kurikulum baru yaitu kurikulum berbasis kompetensi. Untuk itu, guru perlu diberikan otonomi yang bertanggungjawab agar persoalan-persoalan pendidikan yang terkait dengan siswa dapat dikelola secara komprehensif.

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) secara prinsip berbeda dengan kurikulum yang ada (sebelumnya). Perbedaan yang paling utama adalah harapan agar guru secara otonom mengelola kegiatan pembelajaran di kelas dengan lebih menekankan pada partisipasi aktif siswa di dalamnya. Permasalahan utama yang perlu dibahas adalah bagaimana sesungguhnya otonomi guru pada kerangka KBK, dan bagaimana peran yang seharusnya dilakukan oleh guru?

KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (KBK)

Definisi KBK

Secara umum, Winataputra (dalam Suparman, 2001) mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat materi pelajaran dan pengalaman belajar yang relevan, dan sengaja dirancang oleh suatu lembaga untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu melalui berbagai variasi pembelajaran. Di tingkat sekolah, definisi ini menekankan pada seperangkat materi pembelajaran dalam suatu mata pelajaran sebagai materi yang akan dibahas oleh guru dan siswa, terorganisasikannya pengalaman belajar yang berfungsi memberi kemudahan pencapaian tujuan oleh siswa, tujuan pembelajaran sebagai kriteria untuk mengukur terjadinya perubahan perilaku siswa, dan pemanfaatan berbagai strategi pembelajaran sebagai sarana tumbuhnya proses pembelajaran yang bermakna.

Dalam praktiknya, Suparman (2001) menegaskan bahwa kurikulum pada prinsipnya terdiri dari sejumlah rencana tertulis tentang bidang-bidang tertentu yang menggambarkan pengalaman belajar yang akan dicapai. Kurikulum dapat berbentuk suatu mata pelajaran yang meliputi pokok bahasan dan garis besar materi ajar yang dapat diimplementasikan di dalam maupun di luar sekolah. Dengan demikian, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan materi ajar serta strategi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.

Pada saat ini, Departemen Pendidikan Nasional telah mengeluarkan kurikulum baru untuk persekolahan yang diharapkan dapat diterapkan secara nasional pada tahun 2004. Kurikulum yang dimaksud dinamakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) (Sidi, 2001). KBK adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang dibakukan dan cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Isi pokok KBK sebagaimana dikemukakan oleh Depdiknas (2002) meliputi seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai, penilaian, kegiatan pembelajaran, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kebiasaan berfikir dan bertindak yang direfleksikan secara konsisten dan terus menerus sehingga memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar untuk melakukan sesuatu.

Dimensi KBK

KBK pada prinsipnya memiliki ciri-ciri yaitu menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman, guru memiliki keleluasaan untuk mengelola kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi, sumber belajar berupa guru dan sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif, dan penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar untuk mencapai suatu kompetensi (Depdiknas, 2002).

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikatornya yang dapat diukur dan diamati. Kompetensi dapat dicapai melalui pengalaman belajar yang di-

kaitkan dengan bahan kajian dan materi ajar secara kontekstual. Rumusan kompetensi pada KBK merupakan pernyataan apa yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, dan dilakukan siswa di setiap jenjang persekolahan. Rumusan tersebut sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten.

Siswa dapat dikatakan kompeten apabila telah mencapai ketuntasan dalam belajar. Agar siswa dapat menuntaskan belajarnya, maka yang bersangkutan perlu diberikan layanan bimbingan secara intensif baik secara individu maupun kelompok dalam program remedial, pemantapan, dan pengayaan. Wahana pencapaiannya diwujudkan dalam bentuk materi ajar dengan mempertimbangkan keseimbangan etika, estetika, logika, dan kinestetika. Kompetensi dikembangkan secara berkesinambungan yang menggambarkan suatu rangkaian kemampuan yang bertahap, berkelanjutan, dan konsisten seiring dengan perkembangan psikologis siswa.

KBK pada prinsipnya memiliki beberapa dimensi yang harus diperhatikan secara seksama oleh guru di sekolah. Dimensi yang dimaksud, meliputi pendekatan, waktu belajar, kegiatan pembelajaran, dan diversifikasi (Depdiknas, 2002). Dimensi pendekatan, KBK menggunakan pendekatan kompetensi, artinya kompetensi merupakan hasil akhir yang harus dimiliki oleh siswa setelah mempelajari seperangkat materi ajar yang bersifat komprehensif pada aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Dimensi waktu belajar, KBK bersifat semester sehingga siswa memiliki waktu yang relatif cukup untuk mencapai kompetensi yang dipersyaratkan. Dimensi kegiatan pembelajaran, KBK menekankan pada kemandirian guru dalam mengembangkan secara kreatif materi ajar untuk mencapai kompetensi tertentu. Kegiatan pembelajaran di kelas lebih menekankan pada aktualisasi diri siswa dalam kerangka pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi pemahaman secara komprehensif. Siswa sebagai pusat setiap kegiatan pembelajaran yang dipandu oleh guru yang kreatif dan inovatif.

Dimensi diversifikasi, KBK memperhatikan keberagaman kemampuan siswa pada klasifikasi tiga kelompok, yaitu normal, sedang, dan tinggi. Depdiknas (2002) menegaskan bahwa KBK yang didiversifikasi untuk masing-masing kelompok mempunyai tujuan sebagai berikut (a) *kelompok normal*, untuk mengembangkan pemahaman tentang prinsip dan praktikal aplikasi dan kemampuan praktikal akademik yang berhubungan dengan ruang lingkup pekerjaan; (b) *kelompok sedang*, untuk mengembangkan kemahiran berkomunikasi, kemahiran menggali potensi diri, dan aplikasi praktikal dan me-

ngembangkan kemahiran akademik dan kemahiran praktikal sehubungan dengan tuntutan dunia kerja ataupun untuk melanjutkan program pendidikan profesional; dan (c) *kelompok tinggi*, untuk mengembangkan pemahaman tentang prinsip, teori, dan aplikasi dan kemampuan akademik untuk memasuki pendidikan tinggi.

Tujuan KBK

KBK ditujukan untuk menciptakan lulusan yang kompeten untuk membangun kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kurikulum ini merupakan suatu sistem kurikulum nasional yang mengakomodasikan berbagai kebutuhan tingkat nasional, daerah, dan sekolah, serta dapat diperkaya untuk kepentingan global. Sebagai suatu sistem, KBK merupakan standar kompetensi nasional. Daerah dan sekolah menjabarkan standar tersebut ke dalam seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan, pengalaman belajar, materi pembelajaran, alokasi waktu, pengelolaan kelas, media dan sumber belajar, serta penilaian hasil belajar.

Keberhasilan pelaksanaan KBK ditandai dengan perwujudan kebiasaan berpikir dan bertindak siswa dalam kehidupan sehari-hari di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. KBK perlu dinilai secara berencana dan berkala untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Berkenaan dengan hal tersebut, penilaian kurikulum dilakukan oleh berbagai komponen yang terkait pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, dan sekolah (Depdiknas, 2002).

OTONOMI GURU DALAM PEMBELAJARAN

Perlunya pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berhubungan dengan proses pembelajaran siswa dan perubahan-perubahan yang selalu mengikutinya. Sebagaimana dinyatakan oleh Olivia (1992) bahwa pengembangan kurikulum diperlukan untuk menghadapi dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan di luar sistem pendidikan, kebutuhan siswa, kemajuan-kemajuan di bidang pendidikan, dan perubahan sistem pendidikan.

Departemen Pendidikan Nasional mengembangkan kurikulum yang akan diberlakukan di setiap jenjang persekolahan berdasarkan pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. KBK merupakan ha-

sil pengembangan kurikulum saat ini (Depdiknas, 2002). Untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan lain yang sedang berlaku. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan situasi, kondisi, dan kemampuan di daerah.

Keharusan desentralisasi kurikulum terutama terkait pada pengembangan silabus dan pelaksanaannya disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan siswa, keadaan sekolah, dan kondisi daerah. Dengan demikian, daerah atau sekolah memiliki cukup kewenangan untuk merancang dan menentukan hal-hal yang akan diajarkan, pengelolaan pengalaman belajar, strategi pembelajaran, dan menilai keberhasilan suatu proses pembelajaran. Seiring dengan ketentuan tersebut, pelaksanaan KBK lebih banyak diserahkan kepada daerah untuk merumuskan lebih lanjut kerangka implementasinya berdasarkan kerangka nasional yang ditetapkan oleh Depdiknas. Implementasi yang dimaksud terkait dengan kegiatan intra kurikuler dan peran tenaga kependidikan (guru). Depdiknas (2002) menetapkan secara nasional pedoman kegiatan intra kurikuler dengan ketentuan selama satu tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektifitas, dan hak-hak siswa.

Guru sebagai salah satu tenaga kependidikan di sekolah diharuskan mempunyai kualifikasi kompetensi pada mata pelajaran tertentu. Kompetensi tersebut perlu disertifikasi secara periodik oleh lembaga yang ditugaskan untuk melakukan sertifikasi. Dalam mewujudkan kompetensinya, guru diberikan kemandirian untuk mengembangkan materi ajar dan silabus berdasarkan kompetensi, standar materi dan indikator capaian belajar yang telah tersusun. Melalui kemandirian ini, guru diharapkan dapat melakukan tindakan-tindakan inovatif dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Tujuannya agar seluruh proses pembelajaran memberikan kebermaknaan bagi siswa.

Pada prinsipnya kegiatan pembelajaran meliputi tiga aspek kegiatan, yaitu perencanaan, proses dan evaluasi (Depdikbud, 1994; Henson, 1996; Ellies, 1998). Perencanaan pembelajaran merupakan *blue print* guru untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Proses merupakan suatu kegiatan aplikatif dari perencanaan yang telah tersusun. Evaluasi merupakan kegiatan akhir untuk mengetahui sejauhmana hasil yang telah dicapai suatu proses

kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah tersusun (Johnson & Johnson, 1991). Jika ketiga aspek kegiatan itu dilaksanakan secara optimal, maka hasil yang diharapkan dalam bentuk prestasi belajar dapat terwujud.

Otonomi guru menjadi faktor yang menentukan capaian mutu pendidikan bila dikaitkan dengan tingkat keberhasilan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran secara keseluruhan (John, 1997). Melalui otonomi, guru memiliki keleluasaan dalam menyusun rancangan pembelajaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran, guru dapat mengembangkan kreativitasnya dalam menggunakan media dan strategi pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, guru dapat melakukan tugasnya untuk mengevaluasi kemampuan siswa secara komprehensif.

Pada prinsipnya, guru secara otonom mengelola pembelajaran, meliputi perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran secara efektif, efisien, dan menarik sehingga hasil belajar (prestasi belajar) siswa akan optimal pula (Kindsvatter, 1996; Print, 1993; John, 1997). Dengan demikian, otonomi menjadi sesuatu yang amat penting bagi guru untuk beraktivitas dan berkreaitivitas dalam mengelola kegiatan yang meliputi perencanaan, proses, dan evaluasi akan sangat mempengaruhi tingkat keoptimalan hasil belajar siswa.

OTONOMI GURU PADA KERANGKA KBK

Otonomi pada prinsipnya diartikan sebagai kewenangan/kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri. Prinsip otonomi dalam kerangka otonomi sekolah terkait dengan kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan yang berlaku (Depdiknas, 2001). Jika pengertian otonomi ini diimplementasikan pada bidang keguruan, maka otonomi guru dapat diartikan sebagai kemandirian guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kemandirian merupakan unsur yang amat penting bagi guru untuk mewujudkan profesinya secara profesional.

Pentingnya aspek kemandirian guru dalam mewujudkan profesinya secara profesional perlu memperhatikan komponen-komponen kompetensi guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Usman (2000) menegaskan bahwa pemahaman, pengertian, dan pandangan guru akan banyak mempengaruhi peranan dan aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran. Sebaliknya, aktivitas guru dalam mengajar serta aktivitas siswa dalam belajar sangat bergantung pada pemahaman guru terhadap

pengelolaan pembelajaran. Mengelola pembelajaran bukan sekedar proses penyampaian ilmu pengetahuan, melainkan memfasilitasi terjadinya interaksi manusiawi dengan berbagai aspeknya yang cukup kompleks seiring dengan tuntutan perkembangan jaman.

Selama ini guru merasakan belum memiliki kemandirian untuk melaksanakan tanggungjawab profesionalnya dalam mengelola kegiatan pembelajaran. KBK diharapkan menjadi jawaban yang tepat bagi guru untuk memperoleh kemandirian dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Sidi (2001) menegaskan bahwa pada prinsipnya KBK memberikan kemandirian kepada guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran di kelas. Guru memiliki kemandirian yang besar untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pembelajaran.

Kemandirian Guru dalam Merencanakan Pembelajaran

Pada bagian ini, guru memiliki kemandirian penuh dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. KBK secara nasional hanya terdiri atas kompetensi dasar yang diinginkan pada jenjang dan satuan sekolah, standar materi, dan indikator hasil belajar. Depdiknas (2002) menegaskan agar isi pesan ini dapat diimplementasikan secara nyata di kelas, maka guru perlu memiliki kemandirian untuk menerjemahkan, menjabarkan, dan melakukan modifikasi materi, sehingga menjadi kemasan materi ajar yang tepat untuk siswa. Ketepatan ini disesuaikan dengan karakter siswa, karakter sekolah, karakter lingkungan, dan karakter sumber belajar yang tersedia.

Meskipun guru memiliki kemandirian, akan tetapi yang perlu diwaspadai adalah dampak yang mungkin ditimbulkannya. Bagi guru yang kreatif dan inovatif mungkin bukan suatu persoalan penting jika mereka dituntut untuk mengembangkan materi pelajaran sesuai dengan situasi dan kondisi sekolahnya. Akan tetapi, bagi guru yang terbiasa bergantung pada petunjuk kepala sekolah, penerbit atau pihak lain yang *menyuapinya*, maka kenyataan ini sungguh menyulitkan mereka. Para guru akan merasa amat kesulitan dalam merencanakan program yang tepat bagi siswanya, termasuk komposisi materi pelajaran yang semestinya disampaikan kepada siswa. Oleh karenanya, guru secara umum perlu dipandu dan didampingi secara intensif untuk merencanakan program sehingga kelak jika KBK telah diterapkan secara resmi, para guru dapat mewujudkan kemandiriannya dalam merencanakan program.

Kemandirian Guru dalam Melaksanakan Pembelajaran

Proses pembelajaran dalam aplikasinya merupakan perwujudan dari perencanaan pembelajaran. Pada bagian ini, guru dituntut agar memiliki profesionalisme dalam memilih strategi pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik siswa, materi, dan sumber belajar. Depdiknas (2002) terdapat penegasan bahwa KBK bertumpu pada kompetensi siswa. Kompetensi yang semestinya dimiliki oleh siswa pada mata pelajaran di jenjang dan satuan pendidikan tertentu. Hal ini mengandung makna agar guru secara kreatif dan inovatif memilih, menentukan, dan mempraktikkan strategi pembelajaran sehingga memungkinkan siswa memiliki kompetensi yang diharapkan.

Sebagaimana pada perencanaan pembelajaran, kemungkinan kendala yang diperkirakan sering muncul di sekolah adalah keterpakuan pola guru dalam memilih, menentukan, dan mempraktikkan strategi pembelajaran di kelas. Belajar dari pengalaman kegagalan CBSA. Program ini dianggap gagal, manakala tidak ditemukan perubahan yang berarti pada diri siswa meskipun telah dicobakan model CBSA dalam proses pembelajaran. Jika kita mau jujur, sesungguhnya kegagalan itu bukan terletak pada kurang-baiknya model CBSA, akan tetapi lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman guru pada hakikat CBSA, sehingga implementasinya di kelas menjadi tidak tampak. Pada akhirnya tidak ditemukan perubahan yang berarti pada diri siswa.

Ke depan, implementasi KBK pun tampaknya akan menghadapi banyak kendala, terutama berpusat pada persiapan Depdiknas dalam merencanakan, mensosialisasikan, menguji-cobakan, dan mengimplementasikan KBK. Kekurangcermatan rangkaian perencanaan hingga implementasi program akan sangat menentukan sejauhmana kemampuan guru dalam memahami hakikat KBK, agar kemandirian guru pada pelaksanaan dapat terwujud.

Kemandirian Guru dalam Mengevaluasi Pembelajaran

Bagian penting KBK yang terkait dengan evaluasi pembelajaran adalah pentingnya pelaksanaan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan (Depdiknas, 2002). Evaluasi bukanlah suatu aktivitas yang berfungsi hanya untuk menaksir kemampuan siswa secara parsial, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh meliputi proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan wawasan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dicapai siswa. Pada bagian ini, guru benar-benar memiliki kemandirian dalam merencanakan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.

Secara mandiri, guru bersama-sama siswa merencanakan pola evaluasi dan melaksanakan evaluasi itu berdasarkan karakteristik kompetensi dan karakteristik siswa. Pola evaluasi yang diharapkan memiliki kontribusi untuk menaksir kemampuan siswa secara komprehensif dan berkesinambungan adalah evaluasi portofolio. Depdiknas (2002) menegaskan bahwa evaluasi portofolio dimaksudkan untuk memperoleh berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan, menyeluruh, tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan pengetahuan, sikap, dan keterampilan siswa yang bersumber dari catatan dan dokumentasi pengalaman belajar.

PERAN GURU DALAM PEMBELAJARAN BERDASARKAN KBK

Meskipun diyakini bahwa otonomi guru merupakan faktor penting untuk mendongkrak mutu pendidikan, khususnya pembelajaran, namun untuk mewujudkannya bukanlah persoalan yang mudah. Otonomi sangat penting bagi guru yang terbiasa bekerja secara mandiri dan optimal. Sebaliknya, bagi guru yang terbiasa tergantung pada pihak lain dan baru melakukan suatu aktivitas setelah diperoleh petunjuk dan contoh yang jelas, maka persoalan otonomi bukanlah menjadi permasalahan penting bagi mereka. Terlepas dari dua hal yang ironis itu, sesungguhnya persoalan otonomi telah menjadi wacana luas bagi seluruh komponen bangsa Indonesia.

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemandirian dalam menunaikan tanggungjawabnya. Supriyadi (1998/1999) menegaskan pentingnya kemandirian guru dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan di daerah hendaknya membuat konsep yang jelas tentang pola peningkatan mutu guru. Dalam hal ini, guru harus dipandang sebagai profesi mandiri bukan sebagai bagian dari birokrasi. Peningkatan mutu profesi sekurang-kurangnya meliputi empat hal. Pertama, kapasitas dan kemampuan; guru harus dapat memperbaharui dan menambah pengetahuannya sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, kemampuan berinovasi, mentransformasi pengetahuan, memberikan makna pada materi pelajaran bagi siswa secara nyata sesuai dengan kehidupan nyata di masyarakat. Ketiga, menggunakan waktu secara total untuk mengabdikan diri pada profesinya. Keempat, bertanggungjawab kepada diri sendiri seiring dengan upaya berprestasi sehingga memberikan kebermaknaan pada diri dan lingkungan masyarakat sekitar.

Pada bagian lain, Usman (2000) menegaskan bahwa kemandirian guru terletak pada kemampuannya dalam mewujudkan kompetensi pribadi dan

kompetensi profesinya. Pada bagian kompetensi pribadi, guru dituntut untuk memiliki kemampuan optimal dalam berperilaku dan bertindak, sehingga apapun yang dilakukan olehnya dapat dijadikan contoh bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekitarnya. Kompetensi profesional guru terletak pada kemampuannya secara optimal dalam mewujudkan tanggungjawabnya untuk mengelola kegiatan pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang profesional adalah pembelajaran yang memberikan makna optimal bagi siswa untuk mewujudkan kemampuan dirinya sesuai kompetensi yang dipersyaratkan di setiap mata pelajaran sesuai jenjang sekolah.

Mengingat secara prinsip kegiatan pembelajaran terdiri dari tiga aspek, yaitu perencanaan, proses, dan evaluasi maka seluruh aspek tersebut harus dikelola secara kondusif dan senantiasa bertumpu pada siswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Harapan ini dapat diwujudkan dalam rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan memperhatikan unsur aktif, kreatif, efisien dan menyenangkan (Pakem).

Pembelajaran aktif, merupakan sesuatu yang seharusnya nampak di kelas. Proses pembelajaran yang benar semestinya berorientasi pada siswa (*student oriented*). Supriyadi (1998/1999) menegaskan bahwa kegiatan pembelajaran merupakan proses bantuan guru terhadap siswa dalam memahami suatu konsep dasar dengan bertumpu pada pikiran siswa. Sebaliknya, kegiatan pembelajaran bukanlah hanya transformasi ilmu dari guru kepada siswa dengan paksaan latihan tugas bagi siswa. Hal ini sejalan dengan pandangan konstruktivisme dalam belajar. Corebima (2002) menegaskan adanya belajar sesungguhnya bukanlah sekedar proses menghafal semata. Akan tetapi, belajar merupakan proses agar siswa benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Jadi, siswa perlu dibiasakan dengan memecahkan masalah, menemukan masalah yang berguna bagi dirinya dan bergelut dengan ide-ide.

Dengan demikian, fungsi guru dalam pembelajaran adalah membiasakan siswa untuk aktif menemukan dan menerapkan informasi kompleks, mengecek informasi baru, membandingkan dengan aturan lama, dan memperbaiki aturan itu jika tidak sesuai lagi. Guru berperan aktif untuk membantu siswa guna menemukan fakta, konsep, atau prinsip dari diri mereka sendiri, bukan sekedar ceramah dan mengendalikan seluruh aktivitas kelas.

Pembelajaran kreatif, pada prinsipnya terkait dengan dua permasalahan pokok. Pertama, guru kreatif merancang seluruh kegiatan pembelajaran. Kedua, siswa dimungkinkan keterlibatannya secara kreatif dalam menemukan

dan memecahkan permasalahan belajar. Kreativitas dalam belajar bukan hanya bertumpu pada diri siswa saja melainkan juga pada diri guru. Siswa dan guru merupakan dua pihak yang berkepentingan terhadap kreativitas dalam pembelajaran.

Nur & Wikandari (2000) mengemukakan adanya unsur kreativitas pembelajaran dengan memberikan salah satu contoh aktivitas siswa dalam memecahkan permasalahan secara kreatif. Siswa diberikan batasan waktu yang memadai dan strategi yang tepat untuk pemecahan masalah. Pembatasan ini memungkinkan siswa secara kreatif dalam memecahkan permasalahan dengan menggunakan strategi yang tepat. Guru seharusnya mengajarkan strategi yang dimaksud dengan memperhatikan unsur pemikiran ide yang tidak umum, pencetusan banyak ide, perencanaan, pemetaan kemungkinan-kemungkinan, pemaduan fakta-fakta, dan perumusan masalah secara jelas.

Pembelajaran efisien, diartikan sebagai upaya guru dalam mengelola pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia dan menghasilkan sesuatu yang optimal. Seringkali ketidak-optimalan kerja guru di kelas disebabkan oleh gangguan-gangguan yang terjadi di kelas, sehingga pengelolaan kelas tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Djamarah dan Zain (1996) mengemukakan pentingnya guru memperhatikan prinsip-prinsip dalam mengelola kelas, meliputi hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, keluwesan, dan penekanan pada hal-hal positif.

Prinsip hangat dan antusias terkait dengan perilaku guru yang hangat dan akrab terhadap siswa, sehingga siswa memperoleh kenyamanan dan kesenangan dalam belajar tanpa adanya tekanan dan paksaan. Tantangan terkait dengan ketepatan penggunaan kata-kata, tindakan, atau cara kerja yang menantang sehingga mendorong siswa untuk bergairah dalam belajar. Variasi penggunaan strategi pembelajaran yang meliputi media dan metode akan memungkinkan siswa untuk terlibat secara aktif pada kegiatan pembelajaran sesuai dengan seluruh potensi yang dimilikinya. Keluwesan guru dalam merubah dan menyesuaikan pola pembelajaran akan mempengaruhi efektivitas proses pembelajaran secara keseluruhan. Penekanan kegiatan pembelajaran pada hal-hal yang *positif* dapat menghindarkan diri agar siswa tidak berperilaku negatif. Guru perlu memberikan penguatan-penguatan positif, penghargaan yang semestinya, dan contoh-contoh perilaku positif di kelas. Untuk itu, penanaman disiplin diri haruslah dimulai dari diri guru. Jangan pernah bermimpi terjadi perubahan disiplin diri siswa, jika gurunya sendiri tidak memberikan contoh disiplin yang tepat pada siswanya.

Pembelajaran menyenangkan, mengandung maksud kondisi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kegairahan belajar siswa terlihat sebagai implementasi dari luapan motivasinya (Djamarah & Zain, 1996). Siswa menunjukkan perilaku giat dalam belajar di kelas. Siswa dapat belajar dengan penuh konsentrasi tanpa adanya gangguan yang berarti dari lingkungan sekitarnya. Untuk mewujudkan hal ini, guru sudah pasti harus memberikan perhatian yang menyeluruh terhadap seluruh siswa di kelas dengan keberagaman tingkat pengetahuan yang dimilikinya. Sebagaimana diketahui bahwa jika guru hanya mengajar tanpa memperhatikan mengerti-tidaknya siswa terhadap materi ajar yang sedang dipelajarinya, maka siswa akan memberikan reaksi yang negatif. Hal ini mengakibatkan tidak terjadinya umpan balik antara guru dengan siswa.

PENUTUP

Otonomi guru menjadi faktor yang menentukan capaian mutu pendidikan bila dikaitkan dengan tingkat keberhasilan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran secara keseluruhan. Otonomi guru diartikan sebagai kemandirian guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku. Kemandirian merupakan unsur yang amat penting bagi guru untuk mewujudkan profesinya secara profesional.

Dengan kemandirian yang dimilikinya, guru leluasa untuk menyusun rancangan pembelajaran sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran, guru dapat mengembangkan kreativitasnya dalam merancang dan menggunakan strategi pembelajaran agar kegiatan pembelajaran memberikan kebermaknaan bagi siswa. Pada akhir pembelajaran, guru mengevaluasi sejauhmana capaian kebermaknaan pembelajaran bagi siswa yang ditandai oleh hasil belajar (prestasi belajar) siswa.

Selama ini guru merasakan belum memiliki kemandirian untuk melaksanakan tanggungjawab profesionalnya dalam mengelola kegiatan pembelajaran. KBK diharapkan menjadi jawaban yang tepat bagi guru untuk memperoleh kemandirian dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Pada prinsipnya KBK memberikan kemandirian kepada guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran di kelas. Guru memiliki kemandirian yang besar untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pembelajaran secara kondusif dan senantiasa bertumpu pada siswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran. Harapan ini dapat diwujudkan dalam rancangan, pelaksanaan,

dan evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dengan memperhatikan unsur aktif, kreatif, efisien dan menyenangkan (Pakem).

Pentingnya usur PAKEM dalam rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dimaksudkan agar siswa sebagai pusat kegiatan pembelajaran dapat dikembangkan potensinya secara komprehensif dan optimal. Artinya, seluruh potensi fisik dan mental siswa perlu diperhatikan pada saat guru merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Pola ini memang tidak mudah untuk diwujudkan, akan tetapi juga tidak mustahil untuk diwujudkan. Tergantung pada diri kita sebagai guru, apa yang akan dituju manakala mengelola kegiatan pembelajaran di kelas. Jika kita tidak ingin agar mutu pendidikan terus merosot, maka kita harus mengelola kegiatan pembelajaran secara tepat sebagai wujud kemandirian guru sesuai kerangka KBK.

DAFTAR RUJUKAN

- Asmuni, M. 2003. *Kekerasan Pada Anak dan Dampak pada Perilakunya*. Makalah disajikan dalam Pelatihan Pengembangan Pembelajaran Model PAKEM-Portofolio di SDN No. 1 Ketangga Lombok Timur, tanggal 7–8 Juni 2003.
- Corebima, D. 2002. *Teori Belajar Konstruktivisme*. Jakarta: Direktorat SLTP Dirjen Dikdasmen Depdiknas.
- Depdikbud. 1994. *Program Akta Mengajar V-B Komponen Bidang Studi Teknologi Pengajaran: Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Ditjen Dikti Depdikbud.
- Depdiknas. 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Buku 1 Konsep dan Pelaksanaan*. Jakarta: Direktorat SLTP Dirjen Dikmenum Depdiknas.
- Depdiknas. 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Depdiknas. 2002. *Pengembangan Kurikulum dan Sistem Pengujian Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas.
- Djamarah, S.B. & Zain, A. 1996. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ellis, A.K. 1998. *Teaching and Learning Elementary Social Studies*. Boston: Allyn and Bacon.
- Henson, K.T. 1996. *Methods and Strategies for Teaching in Secondary and Middle Schools*. White Plains, NY: Longman.
- Herianto, E. 1997. *Identifikasi Tugas Mengajar Guru: Studi pada Guru SD Peserta Program D2 PGSD-PTM 1997/1998*. Laporan penelitian tidak dipublikasikan. Mataram: Lembaga Penelitian Universitas Mataram.
- John, H.L. 1997. *Models of Teaching*. Houston: College of Education The University of Houston.
- Johnson, D.W. & Johnson, R.T. 1991. Social Skills for Successful Group Work. *Educational Leadership*, 47 (4): 29–33.

- Kindsvatter, R. 1996. *Dynamics of Effective Teaching*. White Plains, NY: Longman.
- Nur, M. & Wikandari, P.R. 2000. *Pengajaran Berpusat Kepada Siswa dan Pendekatan Konstruktivis dalam Pengajaran*. Surabaya: Pusat Studi Matematika dan Sains Sekolah UNESA.
- Olivia, P.F. 1992. *Developing the Curriculum*. New York: HarperCollins.
- Print, M. 1993. *Curriculum Development and Design*. Australia: Allen & Unwin.
- Sidi, I.D. 2001. *Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Suparman, M.A. 2001. *Konsep Dasar Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: PAU untuk Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional, Ditjen Dikti Depdiknas.
- Supriyadi. 1998/1999. Menuju Sistem Pembelajaran yang Bermutu. *Buletin Pelangi Pendidikan V 1 No. 2 Tahun 1998/1999*: 41–45.
- Usman, M.U. 2000. *Menjadi Guru Professional*. Bandung: Rosdakarya.